



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 5, No. 1 Tahun 2022

DOI : 10.21043/politea.v5i1.14529

Negara Adil dan Makmur (Refleksi Filsafat Politik Al-Ghazali)

Ahmad Manbaul Ulum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

ahmadmanbaululum@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the geopolitical situation in various countries where in fact there are still many countries that act arbitrarily against their citizens. This article aims to describe Al-Ghazali's political thought which explains about good governance according to Islam, how to be an equitable leader. Then explain in detail about the basics of justice that must be owned by a leader of the State. The method of this research is library research. The primary data is sourced from Al-Ghazali's book related to political perspective, such as Political Ethics which is a translation of Al-Tibru Al-masbuk Fi Nashihat Al-Muluk. Meanwhile the secondary data is sourced from journals, articles, and documents that related to this research. The result of this research is Al-Ghazali formulated ten principles of justice that must be possessed by a leader, including : recognizing the value of power along with the risks and dangers; the ruler must be happy and like to ask for advice from scholars; moved to eradicate injustice; humble/not arrogant; aware that the ruler/leader is basically also the people; likes to help/cares for the people; qonaah/no luxury; gentle; loves the people; does not violate the shari'ah.

Keywords: justice, leaders, state, politics, welfare

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh situasi geopolitik di berbagai negara dimana pada kenyataannya masih banyak negara yang bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemikiran politik Al-Ghazali yang menjelaskan tentang pemerintahan yang baik menurut Islam, bagaimana menjadi pemimpin yang adil. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka (*library research*). Data primer bersumber dari buku Al-Ghazali yang berkaitan dengan perspektif politik, seperti Etika Politik yang merupakan terjemahan dari Al-Tibru Al-masbuk Fi Nashihat Al-Muluk. Sedangkan data sekunder bersumber dari jurnal, artikel, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Al-Ghazali merumuskan sepuluh prinsip keadilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu : mengakui nilai kekuasaan beserta resiko dan bahayanya; penguasa harus senang dan suka meminta nasehat dari ulama; tergerak untuk memberantas ketidakadilan; rendah hati/tidak sombong; sadar bahwa penguasa/pemimpin pada dasarnya juga rakyat; suka menolong/peduli terhadap rakyat; qonaah/tidak mewah; lemah lembut; mencintai rakyat; tidak melanggar syariat.

Kata Kunci: keadilan, kesejahteraan, negara, pemimpin, politik.

Pendahuluan

Pemikiran politik Al-Ghazali dilatar belakangi oleh keadaan Negara pada waktu itu yang cukup memprihatinkan. Tepatnya pada waktu Al-Ghazali menunaikan Ibadah Haji (490H/1097 M). Ia mendapat kabar bahwa di Baghdad sedang terjadi pergolakan politik. Tentara saljuk menguasai perpolitikan bani Abbas, kekacauan tak terkendali. Melihat hal tersebut Al-Ghazali sangat kecewa, sampai berjanji di depan makam Ibrahim untuk meninggalkan kehidupan Istana dan tidak mau menerima apapun dari kalangan Istana (Iqbal, 2017). Melihat hal tersebut sebagai seorang yang kaya akan pengetahuan kemudian ia memberikan pemikiran terhadap politik (negara). Al-Ghazali menyaksikan langsung gejala politik pada saat itu dimana kerusakan moral dan korupsi di kalangan ulama begitu merebak dan intrik-intrik politik banyak yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.

Lika-liku perjalanan intelektual Al-Ghazali tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial politik umat Islam yang melungkupinya. Pada masanya ia menyaksikan dunia Islam sedang terjadi kekacauan dalam hal kepemimpinan dalam pemerintahan. Ia sendiri menyatakan bahwa pada masanya kebobrokan moral sudah begitu parah dan korupsi di kalangan para ulama dan ahli hukum juga sangat meluas. Selain itu, intrik-intrik politik

yang kerap kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam diperlihatkan secara vulgar oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Pembunuhan antara sesama saudara dalam merebutkan kekuasaan menjadi hal yang biasa. Pada waktu itu kekuasaan bani Abbas sudah semakin lemah. Khalifah hanya berkuasa di sekitar Istana. Mereka tidak lain hanyalah boneka dari wazir yang berasal dari suku non-Arab, seperti Turki dan Persia. Di luar istana Baghdad berdiri Negara-negara kecil, baik di bagian timur maupun barat, yang tidak mau tunduk kepada Khalifah. Kalau ia tetap berada di tengah-tengah masyarakat yang demikian, ia khawatir akan terseret arus dan melakukan perbuatan-perbuatan tercela.

Ia menuturkan bahwa “sesungguhnya kerusakan rakyat disebabkan oleh para pemimpin, dan kerusakan para pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama, kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, siapa yang dikuasai duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil (Iqbal, 2017). Terjadinya ketidakadilan yang dilakukan oleh para penguasa waktu itu menjadikan banyak dari kalangan rakyat biasa yang akhirnya menjadi korban. Keadilan dalam Islam tidak hanya menyangkut dunia atau akhirat saja, tapi keduanya. Al-Ghazali menuturkan bahwa keadilan adalah pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam syari’at (Rini, 2021).

Di sisi lain, dalam suasana politik yang kacau, Al-Ghazali pun kehilangan pendukungnya yang setia yaitu Nizham Al-Mulk, yang tewas terbunuh oleh kelompok Syi’ah Ismailiyah Bathiniyah Pada tahun 485 H/1092 M. Ketika itu kelompok Syi’ah ini yang disebut kelompok Hasyasyin (assassin), dibawah pimpinan Hasan Ibn al-Sabbah, menjadi kelompok yang ditakuti karena mereka sering digunakan oleh orang lain untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Mereka menjadi pembunuh bayaran profesional dan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu diberikan minuman keras. Kematian Nizham Al-Mulk sangat menggusarkan hati Al-Ghazali, ia khawatir apabila kelompok Hasyasin ini akan membunuhnya pula, karena ia pernah mengecam paham golongan Bathiniyah ini. Dengan kepergiannya dari Baghdad ke Damaskus untuk menghindari pembunuhan kelompok tersebut yang berhasil membunuh Nizham Al-Mulk.

Pembahasan tentang konsep pemerintahan yang baik banyak ditawarkan oleh para pemikir/filosof, yang kemudian beberapa Negara mencoba mengaplikasikan konsep tersebut dalam menjalankan sebuah roda pemerintahan. Tidak kalah pentingnya apabila pemikiran Al-Ghazali tentang konsep pemerintahan juga bisa di aplikasikan dalam menjalankan roda pemerintahan karena dipandang masih cukup relevan. Terlebih jika konsep tersebut di aplikasikan dalam Negara yang mayoritas didominasi oleh penduduk muslim, dimana Al-Ghazali dalam menemukan gagasannya ia merujuk kepada wahyu Allah. Yang menjadikan pembeda antara pemikiran Al-Ghazali dengan para intelektual Barat hanyalah usaha dalam menemukan suatu gagasan. Perbandingan antara konsep Al-Qur'an dengan penjelasan para mufassir dan para filsuf terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah konsep Al-Qur'an bersifat deduktif sementara pandangan para filsuf bersifat induktif (Saputra, 2012).

Tujuan dari tulisan ini untuk melengkapi kekurangan dari studi-studi yang telah dilakukan. Studi yang telah ada tentang pemikiran politik Al-Ghazali sejauh ini berfokus terhadap dua hal. *Pertama*, yaitu studi yang mengkaji tentang konsep pemerintahan yang baik menurut Islam, diantaranya dijelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah yang didasarkan kepada hukum Tuhan dan yang buruk adalah yang tidak sesuai hukum Tuhan (Gufron, 2015). *Kedua*, studi yang fokus terhadap bagaimana kriteria pemimpin atau penguasa yang baik dalam Islam seperti yang diajarkan oleh Al-Ghazali bahwa pemimpin harus cerdas dan bermoral. dengan ilmu dan adab yang benar akan melahirkan pemerintahan yang baik dan akan terwujud keadilan, transparansi dan integritas (Hasib, 2017). Secara spesifik yang membedakan tulisan ini dengan penelitian lainnya adalah tulisan ini berusaha memberikan analisa terhadap pemikiran politik Al-Ghazali yang menjelaskan tentang manajemen pemerintahan yang baik dan benar menurut agama Islam, bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan secara detail menjelaskan tentang dasar-dasar keadilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (library research) yang mana data-datanya bersumber dari kepustakaan atau literatur-literatur terkait. Dalam Penelitian

kepastakaan sumber datanya terdiri sumber primer dan juga sumber sekunder (Bakker & Zubair, 1990). Artinya penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menelaah karya-karya ilmiah, baik berupa buku, majalah, jurnal, makalah, serta berbagai media yang mengulas terkait penelitian ini. Dalam penelitian *library research*, setidaknya ada dua tahap, yaitu; *pertama* tahap pengumpulan data dan *kedua* tahap pengolahan dan analisis data. Data Primer bersumber dari beberapa literatur yang memuat tentang kajian pandangan politik Al-Ghazali, antara lain adalah buku *Adab Berpolitik* yang merupakan terjemahan dari *Al-Tibru Al-Masbuk Fi Nashihat Al-Muluk* karya Al-Ghazali . Data Sekunder bersumber dari beberapa jurnal, artikel dan tulisan yang berhubungan dengan materi penelitian.

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu penulis akan mendeskripsikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan materi penelitian dan merincinya secara sistematis supaya mempermudah bagi penulis untuk mengklasifikasi data, sementara metode analisis data digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan pernyataan-pernyataan mengenai subjek penelitian ini, sehingga dengan demikian arti dan makna dalam pernyataan-pernyataan dapat dipahami dengan jelas (Sudarto, 1996).

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Politik Al Ghazali

Al-Ghazali dapat dikatakan sebagai pemikir Muslim yang cukup populer dan cukup berpengaruh dalam dunia Islam. Pemikiran keislamannya meliputi seluruh aspek ajaran Islam. Dari tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, filsafat, tasawuf, teologi pendidikan hingga politik, Al-Ghazali selalu memberikan sumbangan pemikirannya. Tidak heran jikalau banyak pengamat yang melakukan kajian terhadap pemikiran Al-Ghazali dari berbagai aspek pemikiran tersebut.

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali lahir di Ghazaleh dekat Thus, Khurasan/Persia atau yang sekarang disebut dengan Negara Iran pada tahun 1059 M/450

H . Ia meninggal dunia pada tahun 1111 M/ 501 H. dalam perjalanan intelektualnya Al-Ghazali banyak menulis karya tulis yang tidak hanya berisi tentang ilmu-ilmu keagamaan, diantara karyanya yang berisi kajian bidang ilmu politik diantaranya yaitu kitab *Ihya Ulum Ad-Din*, *Al-Tibru Al-Masbuk Fi Nashihat Al-Muluk*, *Al-Iqtishad al-I'tiqad*. Al-Ghazali sependapat dengan Al-Mawardi bahwa mendirikan imamah hukumnya adalah wajib. Pemikiran Al-Ghazali tentang hal ini dapat dilihat dalam karyanya yang berjudul *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Ia menjelaskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan bahwa Sultan (kekuasaan politik) adalah wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul. Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya (Al-Ghazali, 1969).

Menurut Al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, maka perlu hidup bermasyarakat dan bernegara. Pembentukan Negara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi melainkan juga untuk akhirat. Kewajiban pembentukan negara/pemilihan kepala negara harus berdasarkan kewajiban agama/syar'i, bukan berdasarkan pertimbangan rasio. Agama dan negara seperti dua saudara kembar dari seorang Ibu, keduanya saling melengkapi. Politik (negara) menempati posisi yang penting, berada setingkat dibawah kenabian Karena kemaslahatan umat manusia di Bumi sangat terkait dengan para penguasa yang memimpin Negara. (Ahmadie, 1994). Memang di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana konsep berpolitik dalam Islam akan tetapi ada ajaran nilai-nilai etis dalam aktifitas sosial dan politik umat manusia. Al-Ghazali menuturkan bahwa agama adalah sebuah fondasi dasar dan kepala Negara adalah penjaganya, para pemimpin haruslah bermoral baik (Efrinaldi, 2013).

Plato merupakan salah seorang pemikir barat yang juga sempat merasakan betapa rusaknya moral para penguasa pada saat itu, ia menuturkan bahwa pemerintahan yang baik hanya tercipta jika pemegang kekuasaan tersebut adalah seorang filsuf/orang yang bijaksana. Para filsuf yang paling tepat dijadikan untuk menjadi seorang penguasa,

dan seorang penguasa seyogyanya juga menguasai ilmu filsafat. Dengan demikian kesejahteraan kemakmuran rakyat dalam suatu negara akan bisa terwujud (Hakim, 2010). Pandangan tentang bagaimana pola pemerintahan yang baik ini juga diungkapkan oleh salah seorang tokoh yang memberikan sumbangan pemikiran terhadap dunia politik yaitu Thomas Hobbes, ia terkenal dengan pemikirannya yang disebut dengan *contract social* (kesepakatan bersama). Teori menjelaskan sebuah kesepakatan bahwa masyarakat yang bersangkutan dalam suatu negara berkewajiban untuk menyerahkan segenap kekuatan dan kekuasaannya kepada seseorang atau suatu majlis yang disepakati bersama (Nursanik, 2020).

Pemikiran politik Al-Ghazali terkait pemilihan kepala negara yang konstitusional bisa dilihat dari pendapatnya yang tampak tidak konsisten seperti berikut: *pertama*, Al-Ghazali memandang bahwa secara idealnya seorang pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat/masyarakat suatu negara. *Kedua*, Al-Ghazali menolak pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa pemimpin adalah hak mutlak imam *ma'shum* yang dipilih langsung oleh Tuhan melalui nasab keturunan Ali bin Abi Thalib. *Ketiga*, Al-Ghazali melegitimasi pemerintahan Bani Abbasiyah yang ternyata bukan dipilih oleh rakyat ataupun dipilih oleh Tuhan. Salah satu pembahasan yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia politik adalah tentang bagaimana konsep ataupun model pemilihan kepala Negara yang baik. Dalam hal ini jika dilihat dari kacamata teologis, Al-Ghazali lebih mengutamakan pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun temurun seperti yang terjadi pada masa Nabi, sahabat dan para tabi'in (Syamsul, 2018).

Masalah seputar pengangkatan kepala negara kerap kali menjadi materi bahasan para ahli pemikir politik Islam baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah. Misalnya Al-Baqillani salah seorang tokoh yang mewakili kaum Sunni yang menolak pandangan kaum Syi'ah tentang pengangkatam imam berdasarkan nasab atau garis keturunan. Karena pendapat ini menurutnya didasarkan atas hadis/khabar ahad, tidak berdasarkan atas khabar yang mutawatir. Sedangkan Al-Ghazali termasuk juga Ibn Taimiyah cenderung sependapat dengan kebanyakan para pemikir Sunni terkait bagaimana proses pemilihan pemimpin Negara. Meski demikian Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah tidak secara

tegas merumuskan mekanisme tentang pengangkatan kepala Negara dalam kitab ataupun tulisan-tulisannya (Syamsul, 2018).

Pemikiran Politik Al Ghazali

Perlu diketahui bahwa harkat dan martabat penguasa terangkat tinggi jika ia punya seorang pembantu/seorang perdana menteri yang baik, kompeten dan adil. Sebab tidak ada penguasa yang sendirian bisa mengelola rezimnya dan mengatur pemerintahannya tanpa di bantu seorang perdana menteri. Penguasa yang hanya mengandalkan pikirannya sendiri pasti ia akan terpeleset karena egonya. Nabi Muhammad SAW yang dengan kebesaran harkatnya, keagungan martabatnya dan kefasihannya saja oleh Allah SWT diperintahkan supaya bermusyawarah dalam berbagai perkara dengan sahabat-sahabat yang cerdas dan berilmu. Seperti dalam Firman Allah QS Ali Imron 159:

وشاورهم فى الأمر

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”

Kalau para Nabi saja membutuhkan para pembantu, apalagi yang selain daripada Nabi, tentu saja mereka lebih membutuhkan. Ardeshir bin Babik ditanya: Apa yang paling dibutuhkan oleh seorang penguasa? Ia menjawab: Seorang perdana menteri yang pintar, cermat, jujur dan piawai di bidang manajemen supaya ia bisa diajak bersama-sama mengurus pemerintahan dan memberi masukan terhadap pemerintahan. Seorang penguasa harus memperlakukan perdana menterinya dengan tiga hal: *Pertama*, Jika melihat kesalahannya atau mendapati kelemahannya jangan diatasi dengan menjatuhkan sanksi hukuman. *Kedua*, Jika butuh bantuan atau sumbangan pemikirannya harus demi kepentingan pemerintahan, bukan demi kepentingan menteri. *Ketiga*, Jika ada permintaan kepadanya, jangan memaksa harus dipenuhi olehnya (Shiddiq, 2020).

Sebaiknya seorang penguasa jangan melarang seorang perdana menteri yang dipilihnya dari tiga hal: kalau ingin bertemu dengannya jangan dihalangi, jangan mengucapkan kata-kata yang dapat merusak suasana harmonis dan jangan menyimpan

rahasia darinya. Sebab seorang perdana menteri yang baik pasti akan menjaga rahasia penguasa dan ikut membantu mengatur pemerintahan, pembangunan di wilayah-wilayah, keuangan Negara dan kewibawaannya. Segala sesuatu yang diupayakan oleh pemimpin dan juga pembantunya harus untuk tujuan kesejahteraan bersama terutama untuk kepentingan rakyat. Al Ghazali menuturkan bahwa Islam dengan tegas menolak jika politik menghalalkan segala cara untuk kekuasaan, kekuasaan politik wajib untuk ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib untuk ketertiban akhirat. Wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak pula meninggalkannya (Zawawi, 2015).

Ardeshir mengatakan, “Seorang penguasa wajib mencari empat tipe orang yang berkarakter seperti berikut ini dan jika telah mendapatkannya maka seorang pemimpin harus mempertahankannya: yakni seorang perdana menteri yang bisa dipercaya, seorang sekretaris yang pintar, seorang pengawal yang santu dan seorang teman minum yang tulus. Figur perdana menteri seperti itu bisa dipercaya menunjukkan bagaimana menjaga dan mengamankan kekuasaan. Figur sekretaris seperti itu bisa diandalkan sanggup menunjukkan kepintaran dan keteguhan penguasanya. Figur pengawal seperti itu dipercaya mampu menunjukkan kerelaan sang penguasa terhadap rakyatnya, dan ia tidak mudah marah kepada mereka. Dan figur teman minum yang seperti itu bisa diandalkan mampu mengatur semua urusan dengan baik dan rapi (Shiddiq, 2020).

Selain itu para menteri yang membantu penguasa dan mengatur pemerintahan seharusnya memiliki beberapa sifat berikut ini, menjaga diri dari keserakahan serta menghormati dan menghargai kebaikan-kebaikan para pendahulu. Mereka harus memiliki sebuah rencana yang tepat dan mengerti kapan harus menarik pajak terhadap rakyat dan tentunya harus sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Jika diibaratkan sebagai seorang pemburu maka perburuan mereka harus seperti pemburu burung kurki yang tidak mau membunuh seekorpun burung pipit. Mereka dialang serakah terhadap harta-harta pusaka selama ahli warisnya masih ada. Serakah terhadap harta seperti itu sangat tercela dan dilarang. Mereka juga harus berusaha membuat hati rakyat senang dan girang dengan pemberian-pemberian manfaat dan nikmat, supaya mereka tahu bahwa

kecukupan mereka, keluhuran martabat mereka dan kebaikan mereka sangat tergantung pada kebaikan rakyat (Shiddiq, 2020).

Penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian pejabat di berbagai Negara tentunya sangat bertentangan dengan kode etik sebagai seorang pejabat publik, lebih dari itu jika hal tersebut terus dilakukan maka korbannya adalah para masyarakat yang mengharapkan keadilan dari para pemimpin serta berharap kehidupannya sejahtera malah yang di dapat justru sebaliknya, rakyat terus-menerus ditekan untuk patuh terhadap aturan yang dibuat oleh para penguasa Negara, justru malah di tingkatan atas banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Hal ini juga terlihat dalam dunia politik di Indonesia yang kerap kali para penguasa melakukan pelanggaran namun tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Melihat praktik ketidakjujuran, korupsi para pemimpin Indonesia memungkinkan teori politik yang diajarkan oleh Al-Ghazali cukup relevan diterapkan di Indonesia, yaitu pemimpin harus cerdas dan bermoral baik dan didampingi oleh para menteri yang kompeten dan bermoral baik. Tentunya disesuaikan dengan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia (Febrianti, 2018).

Pemikiran Politik Al Ghazali

Keadilan selalu menjadi sesuatu yang dibicarakan sekaligus diperjuangkan oleh masyarakat dalam suatu Negara. Masyarakat selalu menuntut keadilan terhadap para pejabat yang mengatur roda pemerintahan. Para warga berharap pemimpin yang dipilihnya bisa memberikan kehidupan yang layak dan mendapatkan perhatian, hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi sejahtera. Kerap kali dijumpai dalam kehidupan bernegara/bermasyarakat terdapat perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan terhadap masyarakat dengan melakukan tindakan yang tidak sebagaimana mestinya. Status sosial salah satu hal yang memicu perlakuan tidak adil tersebut. Maka dari situlah muncul keresahan masyarakat sehingga menuntut keadilan terhadap pemerintah.

Konsep tentang keadilan tidak hanya lahir dari pemikiran barat, dalam Islam pun demikian, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk berperilaku adil. Dalam Al-Qur'an keadilan disebut dengan (*al adalah*), yang secara sederhana diartikan sebagai sebuah bentuk upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya (Ma'arif, 2004). Islam mengajarkan agar keadilan dapat diwujudkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Dengan tegaknya keadilan akan melahirkan dampak yang nyata berupa terwujudnya sebuah tatanan masyarakat yang saling menghargai dan terciptanya kehidupan yang harmonis (Rangkuti, 2017).

Dalam perspektif hukum, pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang bisa menjalankan roda pemerintahan dengan memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam kontribusi dengan sebaik-baiknya. Artinya, pemerintah merupakan pelayan masyarakat bukan pemerintah yang meminta dilayani oleh masyarakat (Amin, 2019). Seorang penguasa yang adil ialah ia yang berlaku adil terhadap sesama manusia, menghindari bertindak zalim dan tidak membuat kerusakan. Kekuasaan seorang penguasa yang zalim tidak akan bertahan seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW:

المَلِكُ يَبْقَى مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَبْقَى مَعَ الظُّلْمِ

“Kekuasaan bisa bertahan meski bersama kekufuran dan tidak bisa bertahan dengan kezaliman”.

Dalam memimpin sebuah Negara seorang pemimpin haruslah berbuat adil terhadap rakyatnya baik yang memiliki jabatan dalam pemerintahan ataupun terhadap rakyat biasa, sudah sepatutnya para pemimpin mengetahui jikalau kejayaan dan keruntuhan dunia bersumber dari penguasa. Jika penguasa adil niscaya dunia akan berjaya dan rakyat akan merasa aman (Shiddiq, 2020). Untuk menjadi seorang pemimpin yang ideal, Al-Ghazali menuturkan dasar-dasar keadilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin:

1. Mengetahui nilai kekuasaan beserta resiko dan bahayanya

Kekuasaan adalah salah satu nikmat Allah SWT yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Siapa yang menjalankan kekuasaan dengan benar ia akan mendapatkan

kebahagiaan yang tiada batasnya, dan tidak ada kebahagiaan sama sekali selainnya. Sebaliknya, siapa yang lalai menjalankan kekuasaannya dengan tidak benar ia akan terjerumus dalam celaka yang tiada taranya kecuali kufur kepada Allah SWT (Shiddiq, 2020) yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang berisi tentang besarnya nilai dan serta bahayanya dari kekuasaan adalah seperti berikut:

احب الناس إلى الله تعالى وأقربهم إليه السلطان العادل وأبغضهم إليه وأبعدهم منه السلطان
الجائر

“Manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat dengan-Nya adalah seorang penguasa yang adil. Sementara manusia yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh dari-Nya adalah seorang penguasa yang zalim”.

2. Penguasa harus senang dan gemar meminta nasihat ulama

Seorang penguasa disamping harus gemar meminta nasihat kepada para Ulama ia juga harus waspada terhadap para Ulama yang culas dan serakah terhadap dunia. Soalnya mereka pasti suka memuji penguasa dan berusaha membuat penguasa senang karena rakus ingin mendapatkan harta yang dimiliki penguasa secara curang ataupun menipu. Seorang ulama sejati tidak akan serakah terhadap harta yang dimiliki penguasa dan gemar mengingatkan para penguasa agar berlaku bijaksana.

Salah seorang pemimpin/Khalifah dalam Islam yang gemar meminta nasihat kepada Ulama yaitu Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dikisahkan bahwa ia suatu hari pernah merenung dan berkata: “sudah cukup lama aku hidup di dunia ini, tetapi bagaimana nasibku di akhirat nanti?”. Ia kemudian menemui Abu Hazim seorang Ulama besar yang terkenal zuhud pada zaman itu, Ia berkata: “Suguhi aku makanan yang biasa anda santap saat berbuka.” Abu Hazim kemudian menyuguhkan dedak panggang seraya berkata, “ini makanan bukaku”. Melihat itu Khalifah Sulaiman spontan menangis tersedu-sedu disertai rasa takut yang luar

biasa di hatinya. Setelah berpuasa tiga hari berturut-turut, pada hari yang ketiga ia berbuka dengan lauk tersebut. Konon, pada malam ia menggauli istrinya yang kemudian melahirkan putranya bernama Abdul Aziz, yaitu ayah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana pada saat itu ia menjadi satu-satunya Khalifah yang terkenal adil, suka melayani rakyat, zuhud dan dermawan. Dari kisah ini bisa diambil hikmah sebagai seorang pemimpin betapa pentingnya meminta nasihat kepada ulama, yang bisa jadi karena nasihatnya akan muncul generasi pemimpin-pemimpin yang hebat seperti Umar bin Abdul Aziz (Shiddiq, 2020).

3. Tergerak untuk membasmi kezaliman

Seorang penguasa janganlah merasa puas dengan dan berdiam diri melihat suatu bentuk kezaliman, tetapi berikanlah edukasi terhadap para anak muda teman-teman, para pekerja serta para wakil penguasa. Jangan pernah anda rela mereka berbuat zalim, karena anda pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang dilakukan terhadap mereka sebagaimana anda juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman anda.

4. Rendah hati/tidak sombong

Pada umumnya seorang penguasa itu bersikap sombong dan angkuh, dan dari kesombongan inilah muncul kemarahan rakyat yang mendorong mereka menaruh dendam. Marah adalah hantu, musuh, dan bahayanya akal. Jika marah mendominasi seseorang sebaiknya mengarahkan segala sesuatu pada sifat mengampuni, dan membiasakan berlaku murah serta memaafkan. Jika hal itu sudah menjadi kebiasaan maka anda menyamai perilaku para wali dan Nabi Allah SWT, akan tetapi jika anda suka melampiaskan kemarahan sebagai kebiasaan maka anda menyamai serigala dan binatang.

5. Sadar bahwa penguasa/pemimpin pada dasarnya juga rakyat

Sesungguhnya dalam setiap peristiwa yang menimpa anda dan yang diperlihatkan kepada anda itu sudah ditakdirkan bahwa anda adalah satu dari seluruh rakyat dan bahwa penguasa adalah selain anda. Setiap yang tidak anda

sukai untuk diri anda juga tidak disukai oleh seorang dari kaum muslimin lainnya. Jika anda menyenangkan mereka dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh diri anda, berarti anda telah berkhianat kepada rakyat anda, dan anda telah menipu orang-orang yang ada dalam kekuasaan anda.

6. Gemar membantu/peduli dengan rakyat

Anda jangan meremehkan soal kejenuhan menunggunya orang-orang yang sedang berdiri di depan pintu anda karena memerlukan bantuan anda. Waspadalah terhadap bahaya soal ini. Ketika ada seorang muslim sedang ada perlu dengan anda, jangan tunda untuk segera membantunya, karena anda memilih sibuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena sesungguhnya membantu memenuhi kebutuhan keperluan kaum muslim itu lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah.

7. Qonaah/tidak bermewah-mewahan

Jangan sekali-kali anda membiasakan diri asik dengan kesenangan-kesenangan nafsu, seperti mengenakan pakaian mewah dan makan makanan lezat. Dalam segala hal, anda harus memiliki sifat qanaah, tidak ada keadilan sama sekali tanpa sifat ini. Salah satu figur pemimpin Ummat Muslim yang memiliki sifat qanaah yaitu Khalifah Umar bin Khatthab, dikisahkan suatu hari ia bertanya kepada salah seorang yang sholih: “Apakah pada diriku kau melihat sesuatu yang tidak kau sukai?” Ia menjawab: aku mendengar bahwa anda suka meletakkan dua potong roti di meja makan dan anda juga memiliki dua baju gamis yang satu khusus untuk waktu malam dan yang satunya lagi khusus untuk waktu siang. Kemudian Umar bertanya lagi, Apakah ada hal lain lagi selain itu? Ia menjawab: tidak. Demi Allah SWT kedua hal itu mulai sekarang tidak akan ada lagi padaku untuk selamanya jawab Umar.

8. Lemah lembut

Dalam berperilaku bermasyarakat sepanjang anda bisa melakukan beberapa hal dengan lemah lembut anda jangan melakukannya dengan kasar dan keras. Nabi bersabda:

اللهم الطف بكل وال يلف برعيتيه وأعق على كل وال يعنق على رعيتيه

“Ya Allah, tolong perlakukan lembut setiap penguasa yang berlaku lembut kepada rakyatnya, Sebaliknya, perlakukan kasar setiap penguasa yang berlaku kasar kepada rakyatnya”.

9. Mencintai rakyat

Sedapat-dapatnya anda harus bersungguh-sungguh membuat rakyat anda senang kepada anda karena anda menjalankan ajaran Syari’at. Nabi Muhammad SAW bersabda terhadap para sahabatnya:

خير أمتي الذين يحبونكم وتحبونهم وشر أمتي الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم
وتلعنونهم

“Sebaik-baik ummatku ialah orang-orang yang mencintai kalian dan kalian juga mencintai mereka. Dan seburuk-buruk ummatku ialah orang-orang yang membenci kalian, dan kamu juga membenci mereka yang melaknati kalian dan kalian jangan melaknati mereka”.

10. Tidak melanggar syari’at

Seorang penguasa dilarang menyenangkan orang lain dengan cara melanggar syari’at. Orang yang marah karena syari’at dilanggar, kemarahannya bukan suatu mudarat. Umar bin Khattab r.a. mengatakan, “Sungguh aku terbiasa menghadapi separuh manusia marah kepadaku”, bagi setiap orang yang membela kebenaran harus marah. Tidak mungkin membuat puas dua orang yang berseteru. Manusia paling bodoh ialah orang yang mengabaikan kerelaan Allah demi mengutamakan kerelaan makhluk (Shiddiq, 2020).

Dasar-dasar keadilan yang disebutkan oleh Al-Ghazali seyogyanya bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi para pemimpin Negara yang tentunya

diharapkan memiliki sikap yang adil dan bertanggung jawab. Salah satu pemimpin dalam Islam yang juga menekankan betapa pentingnya bersikap adil sebagai pemimpin adalah khalifah Ali RA. beliau menyatakan bahwa keadilan merupakan sebuah prinsip yang fundamental dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan selalu menjadi perhatian publik. Apabila keadilan bisa diterapkan dengan sebaik mungkin maka dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dan membawa kedamaian (Rangkuti, 2017). Selain bertujuan untuk terciptanya hubungan yang baik antar individu di lingkungan masyarakat dan antara warga dengan para pemimpin Negara, ciri atupun karakter dari keadilan adalah adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral (Nasution, 2014).

Jika nilai dan prinsip keadilan yang seperti itu bisa di aplikasikan secara konsisten maka tidak akan ada konflik yang memicu perpecahan di antara masyarakat. Konsep keadilan yang ditawarkan oleh Al-Ghazali sudah seyogyanya bisa dielaborasi dengan pemikiran para pemikir Barat yang dianggap lebih modern sehingga bisa saling melengkapi. Hal itu karena gagasan filsafat dan tema Al-Qur'an dengan penjelasan para mufassir tidak lepas dari konteks sejarahnya (Saputra, 2012).

Kesimpulan

Dari beberapa uraian tentang pemikiran politik Al-Ghazali dapat dikatakan bahwa konsep pemerintahan yang baik menurut Islam adalah yang didasarkan kepada hukum Tuhan dan yang buruk adalah yang tidak sesuai hukum Tuhan. Begitupula kriteria pemimpin atau penguasa yang baik dalam Islam seperti yang diajarkan oleh Al-Ghazali bahwa pemimpin harus cerdas dan bermoral. Dengan ilmu dan adab yang benar akan melahirkan pemerintahan yang baik dan akan terwujud keadilan, transparansi dan integritas. Dalam sistem pengangkatan kepala Negara Al-Ghazali tidak menyebutkan secara rinci terkait bagaimana semestinya sistem pemilihan kepala Negara yang baik,

akan tetapi secara teologis ia lebih menganjurkan pemilihan pemimpin Negara yang dilakukan secara turun-temurun seperti yang terjadi pada masa nabi, sahabat dan tabi'in.

Dalam menjalankan pemerintahan seorang pemimpin tidak bisa berjalan sendiri, melainkan perlu adanya seorang pembantu ataupun menteri dalam berbagai bidang dan tentunya para menteri tersebut harus kompeten dan bermoral baik. Di Negara yang menggunakan sistem demokrasi, menggunakan sistem pemerintahan seperti yang diajarkan oleh Al-Ghazali tentulah tidak mudah sekalipun diterapkan di Negara dengan mayoritas penduduk Muslim, karena sejatinya politik itu harus merangkul semua lapisan masyarakat, tidak hanya menguntungkan salah satu kelompok tertentu. Meski demikian banyak hal positif yang bisa diambil dari pemikiran politik Al-Ghazali antara lain tentang bagaimana semestinya kriteria pemimpin yang baik seperti misalnya seorang pemimpin harus menguasai dasar-dasar keadilan.

Referensi

- Al-Ghazali. (1994), *Al-Tibru Al-Masbuk Fi Nashihat Al-Muluk*, Terjemahan Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, Nasihat Bagi Penguasa, Bandung: Mizan.
- Al-Ghazali. (1969). *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Dar Al-amanah.
- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal El Afkal*, 8(1).
- Bakker, A., & Zubair, C. A. (1990). *Metode Penulisan Filsafat*. Kanisius.
- Efrinaldi. (2013). Spektrum Fikih Siyasah dan Dinamisasi Pemikiran Politik Islam Di Indonesia. *Jurnal Madania*, 17(1).
- Febrianti, M. (2018). Perpolitikan Indonesia Pasca Pilpres dan Relevansi teori Politik Al-Ghazali. *Konfrontasi: Jurnal Kultur Dan Ekonomi Perubahan Sosial*, 5(2).
- Gufon, U. (2015). Konsep Good Governance Dalam Pandangan Al-Ghazali. *Jurnal Bimas Islam*, 8(4).
- Hakim, A. (2010). Negara Dalam Perspektif Plato. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 9(1).

- Hasib, K. (2017). Konsep Siyasaah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1).
- Iqbal, M. (2017). *Pemikiran Politik Islam*. Kencana.
- Ma'arif, S. A. (2004). *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan*. PSAP.
- Nasution, J. B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2).
- Nursanik. (2020). Kritik Nalar Pemikiran Politik Thomas Hobbes. *Jurnal Al Qisthas*, 11(2).
- Rangkuti, A. (2017). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1).
- Rini, P. N. (2021). Keadilan Sosial Dalam Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Saputra, R. A. (2012). Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof. *Jurnal Dialogia*, 10(2).
- Shiddiq, R. A. (2020). *Adab Berpolitik*. Qaf Media Kreativa.
- Sudarto. (1996). *Metodologi Penulisan Filsafat*. PT. Raja Grafindo.
- Syamsul, yakin. (2018). Pemikiran Politik Al-Ghazali. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 5(1).
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 5(1).